

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP KEMISKINAN
DI INDONESIA TAHUN 2010-2013
(Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YONATAN PASARIBU

12020111120016

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yonatan Pasaribu

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111120016

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN
2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di
Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 8 Januari 2016

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP)
NIP. 196104161987101001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yonatan Pasaribu

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111120016

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN
2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di
Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 19 Januari 2016

Tim penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. (.....)

2. Evi Yulia Purwanti, SE., Msi. (.....)

3. Dr. Nugroho SBM, MSP. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yonatan Pasaribu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak ada terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil dari tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 8 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,

(Yonatan Pasaribu)
12020111120016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Aku hidup di dalam Dia, hidup-Nya di dalam aku

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

-Amsal 1:7-

Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku.

-Filipi 4:13-

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

-Amsal 17:17-

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

**TUHAN YESUS KRISTUS YANG MEMBERIKAN KASIH KARUNIA,
BERKAT SERTA PENYERTAAN**

BAPAK, MAMAK SERTA KETIGA ABANGKU YANG TERKASIH

ABSTRACT

The condition of poverty in Indonesia nationwide continued to decline, but not followed by some provinces in Indonesia have increased from the previous year. Poverty reduction, the government should prioritize budget allocation for programs to reduce poverty. Allocation budget for the poor or so-called pro-poor budgeting.

The objective of this study is analyzing the effect of spending the functions of education, health, social protection and infrastructure against poverty in 33 provinces in Indonesia 2010-2013. The data used in this research is panel data (4 year time series data and cross section data as much as 33 provinces produces 132 observations). The analytical method used in this research is multiple linear analysis method (Pooled Least Squares Regression Analysis) using the model effects fixed (fixed effect model).

Based on the estimation result, government expenditure has a positive effect on the function of education to poverty. While the government expenditure of health and social protection function, negative effect on poverty. government expenditure of infrastructure has no effect to poverty.

Keywords : Poverty, Government Expenditure of Education, Health and Social Protection, Infrastructure Function

ABSTRAK

Kondisi kemiskinan di Indonesia secara nasional terus menurun, akan tetapi tidak diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia justru meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mengalokasikan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat miskin atau yang disebut *pro-poor budgeting*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia periode 2010-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (data time series 4 tahun dan data cross section sebanyak 33 provinsi yang menghasilkan 132 observasi). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda (Pooled Least Square Regression Analysis) dengan menggunakan model efek tetap (fixed Effect Model).

Berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah fungsi Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, perlindungan Sosial, infrastruktur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia serta penyertaan-Nya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan segala proses studi di Universitas Diponegoro serta menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)”** sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan Baik.

Penulis menyadari skripsi dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D selaku dosen wali yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di jurusan Ilmu Eonomika dan Studi Pembangunan.
4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan koreksi dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang selama perkuliahan telah mengajar dan mendidik penulis.
6. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah membantu penulis selama proses studi.
7. Keluarga tercinta, Bapak (Sahat Tua Pasaribu), Mamak (Tioren Lumban Batu) dan kakak-kakakku, Budi Binsar Parulian Pasaribu, Megauli Marpaung

Parlindungan Pasaribu, dan Victor Oloan Pasaribu, untuk kasih sayang, doa, dan setiap dukungan, kepercayaan serta panutan kepada penulis.

8. Keluarga besar Pasaribu dan Lumban Batu, terima kasih untuk doa dan dukungannya kepada penulis.
9. Teater Obkial, terkhusus rekan pengurus selama 3 periode kepengurusan 2012-2015, kakakku Krisnauli, Maria, Enny, Gyna, Remy, Robby, Renhard, Abram, Putri, Tia, Debby, Ondy, Rado, Melvin, Ucup, Claudia, Janette, Astuti, Yuli, Frans, Mangetar, Ruben, Vijay, Yosi, Mutiara, Yossi, Nando, Togi, Mia, Rizki, Roni, Jimmi, Melina, Widya, Efa, Anggito, Dona, Elitna, terimakasih atas pelayanan dan kekeluargaan yang mengajarkan banyak hal.
10. Kelompok tumbuh bersama “Tali Tambang”, mas Adiel, Abram, Doly, rado dan Gio, terima kasih atas kebersamaannya dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik.
11. PMK FEB UNDIP terkhusus teman seperjuangan angkatan 2011, Andrian, Randy, Hendra, Tian, Moses, Samuel, Yehezkiel, Paguh, Mindo, Mariati, Lise, Elliana, Anna, Esther, Amelia, Nola, Axel, serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan yang kalian berikan.
12. Pengurus PMK FEB UNDIP tahun 2013 dan 2014, Pengurus Refomedia tahun 2014, pengurus teater Obkial 2015-2016, serta kepada teman-teman panitia “Malam Seni” terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang telah kita lewati dan berikan.
13. Sahabat seperjuangan IESP angkatan 2011, Karina, Susan, Henia, Paul, David, Marlina, Rara, Prisca, Savira, Fajar, Taufik, Cantika, Ashari, Chandra, Yunita, Lois dan seluruh teman IESP 2011, terima kasih atas tawa, kenangan dan kebersamaan yang telah kita ciptakan.
14. Tim I KKN tahun 2015 desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Jepara, Firaz, Nila, Tiya, Taufiq, Bagus dan Badra, terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan tahapan perkuliahan.
15. LKM PMKP, terima kasih atas pelajaran kepemimpinan yang telah diberikan kepada penulis.

16. Teman kost “Dee-pha kost”, Eben, Candra, Sahat, Jordi, Gabe, Boris, Fredy, Lambertus, Yosevel dan teman yang telah pindah dari dee-pha kost, terima kasih atas kebersamaan dan suka cita yang telah hadir di dalam satu atap.
17. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan atas kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap sara dan kritik yang membangun dari siapapun yang membaca tulisan ini. Hendaknya tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu yang terkait dengan topik skripsi ini.

Semarang, 8 Januari 2016

Penulis

Yonatan Pasaribu

DAFTAR ISI	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	18
2.1.1 Kemiskinan.....	18
2.1.2 Belanja Daerah	23
2.1.3 Belanja <i>Pro-Poor</i>	24
2.1.4 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	25
2.1.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	27
2.1.6 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Kemiskinan.....	28
2.1.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan.....	30
2.1.8 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur Terhadap Kemiskinan.....	31
2.1.9 Penelitian Terdahulu.....	32
2.2 Kerangka Pemikiran	40
2.3 Hipotesis.....	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	46
3.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.4 Metode Analisis.....	47
3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	52
3.4.2 Pengujian Statistik	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	59
4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Indonesia.....	59
4.1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan.....	61
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan	64
4.1.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial .	66
4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur	68
4.2 Analisis Data	70
4.2.1 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	70
4.2.2 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	71
4.2.3 Hasil Uji Statistik	74
4.3 Interpretasi Hasil	76
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	78
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Kemiskinan.....	79
4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan.....	80
4.3.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur Terhadap Kemiskinan.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Keterbatasan	84
5.3 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2013.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010- 2013 (dalam ribu).....	4
Tabel 1.3 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Pendidikan (persen).....	8
Tabel 1.4 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Kesehatan (persen).....	9
Tabel 1.5 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Perlindungan Sosial (persen).....	10
Tabel 1.6 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Infrastruktur (persen).....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2013.....	60
Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Estimasi.....	70
Tabel 4.3 Correlation Matrix.....	72
Tabel 4.4 Uji Park.....	73
Tabel 4.5 Uji Glejser.....	74
Tabel 4.6 Hasil Uji t.....	74
Tabel 4.6 Hasil Koefisien Dummy.....	77

DAFTAR GAMBAR	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan versi Nurkse.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan (dalam juta).....	63
Gambar 4.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan (dalam juta).....	65
Gambar 4.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial (dalam juta).....	67
Gambar 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur (dalam juta).....	69
Gambar 4.5 Uji Normalitas Jarque-Bera.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A Data Variabel Regresi.....	88
Lampiran B Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	96
Lampiran C Hasil Regresi Utama Fixed Effect Model.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan capaian pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan. Salah satu indikator terjadinya pembangunan nasional adalah meningkatnya kesejahteraan umum. Hal ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Badan Pusat Statistik kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan suatu negara juga dapat digambarkan melalui tingkat kemiskinan. Ketika kesejahteraan meningkat, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara, artinya terdapat hubungan negatif antara kedua hal ini.

Pembangunan ekonomi nasional merupakan kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Sehingga pada dasarnya penanggulangan kemiskinan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2006)

Menurut Nasir dkk (2008) salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada

gilirannya akan menciptakan kesejahteraan. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro, 2006).

Haughton dan Shahidur (2012) berpendapat bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan dipengaruhi berbagai hal yang saling berkaitan. Sa'diyah (2012) berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain; tingkat pendapatan, pendidikan yang rendah, kesehatan yang tidak baik, akses terhadap barang dan jasa serta yang sulit serta kondisi lingkungan yang buruk.

Kondisi kemiskinan yang terjadi didasari oleh ketidakmampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi permasalahan kemiskinan mereka dan bisa juga terjadi akibat kurang maksimalnya program pemerintah dalam memberikan bantuan pengurangan kemiskinan (Haughton dan Shahidur, 2012).

Kondisi kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu menurun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 31,023 juta jiwa atau sebesar 13,3 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kemudian angka kemiskinan ini terus menurun sampai pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,553 juta jiwa atau sebesar 11,4 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2010	31023,4	13,3
2011	29890,1	12,5
2012	28594,64	12,0
2013	28553,93	11,4

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009-2013 (diolah)

Angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2013 memang terus menurun. Pada tahun 2013 sekitar 28,55 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Namun, penurunan penduduk miskin secara nasional nyatanya tidak terjadi di beberapa provinsi. Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang justru mengalami peningkatan penduduk miskin pada tahun tertentu.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi di Indonesia ini berada pada Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian Barat. Pada Tahun 2010 hanya terdapat 6 provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin ini adalah Provinsi Sumbar, Riau, Bengkulu, Kep. Riau, Kaltim, dan Papua. Sedangkan pada tahun 2013 provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya menjadi 15 provinsi, yaitu provinsi Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Babel, DKI Jakarta, Banten, Bali, NTT, Kaltim.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013
(dalam ribu)

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin				Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	
1	Aceh	861,9	900,20	876,56	855,71	877,43
2	Sumut	1490	1421,40	1378,45	1390,80	1436,07
3	Sumbar	430,0	441,80	397,86	380,63	415,92
4	Riau	500,3	472,50	481,31	522,53	420,97
5	Jambi	241,6	251,80	270,08	281,57	258,95
6	Sumsel	1125,7	1061,90	1042,04	1108,21	1101,15
7	Bengkulu	324,9	303,40	310,47	320,41	316,66
8	lampung	1479,9	1277,90	1218,99	1134,28	1333,87
9	Babel	67,8	65,60	70,21	70,90	70,22
10	Kepri	129,7	122,50	131,22	125,02	127,33
11	DKI Jakarta	312,2	355,20	366,77	375,70	346,61
12	Jawa Barat	4773,7	4650,80	4421,48	4382,65	4642,45
13	Jawa Tengah	5369,2	5256,00	4863,41	4704,87	5183,84
14	DI Yogyakarta	577,3	564,20	562,11	535,18	564,92
15	Jawa Timur	5529,3	5227,30	4960,54	4865,82	5321,11
16	Banten	758,2	690,90	648,25	682,71	713,63
17	Bali	174,9	183,10	160,95	186,53	177,44
18	NTB	1009,4	896,20	828,33	802,45	917,48
19	NTT	1014,1	986,50	1000,29	1009,15	1004,65
20	Kalbar	428,8	376,10	355,70	394,17	397,91
21	Kalteng	164,2	150,00	141,90	145,36	153,47
22	Kalsel	182,2	198,60	189,21	183,27	185,86
23	Kaltim	243,0	247,10	246,11	255,91	246,26
24	Sulut	206,7	194,70	177,54	200,16	199,74
25	Sulteng	475,0	432,10	409,60	400,09	441,32
26	Sulsel	913,4	835,50	805,92	857,45	875,17
27	Sultenggara	400,7	334,30	304,25	326,71	360,05
28	Gorontalo	209,9	192,40	187,73	200,97	203,12
29	Sulbar	141,3	163,20	160,55	154,20	155,49
30	Maluku	378,6	356,40	338,89	322,51	355,28
31	Maluku Utara	91,1	107,10	88,30	85,82	94,06
32	Papua Barat	256,3	227,10	223,24	234,23	239,53
33	Papua	761,6	946,40	976,37	1057,98	900,55

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010-2013 (diolah)

Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menjadi tidak miskin sangat penting. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. Menurut Guritno (1993), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu fungsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada fungsi tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, dalam konteks kebijakan fiskal, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah (Utama dan Nur, 2012).

Menurut Saparini (2009) bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mengalokasikan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan syarat utama untuk menekan angka kemiskinan.

Dalam mengeluarkan anggaran untuk proses pembangunan, pemerintah membagi kedalam beberapa fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari (1) fungsi ekonomi, (2) fungsi pelayanan umum, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4)

fungsi lingkungan hidup, (5) fungsi perumahan, (6) fungsi pariwisata dan budaya, (7) fungsi pendidikan, (8) fungsi kesehatan, serta (9) fungsi perlindungan sosial.

Menurut Yao (2007), terdapat beberapa kelompok belanja (*spending*) yang dapat didedikasikan bagi kelompok masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang mereka hadapi. Belanja atau pengeluaran seperti ini disebut sebagai *pro-poor social expenditure*. Belanja yang termasuk dalam kategori belanja *pro-poor social expenditure* adalah belanja yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, dan jalan-jalan perdesaan. Sementara Usman dan Herman (2006) menyimpulkan bahwa belanja-belanja untuk sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga dan infrastruktur merupakan kategori yang memiliki kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.

Dalam model pembangunan yang dikembangkan Rostow dan Musgrave dalam Guritno (1993), terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Sebab, pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, namun pada tahap ini peran swasta juga semakin diperlukan. Pada tahap menengah pengeluaran pemerintah dan swasta sedikit beralih pada sektor-sektor lain misalnya industri, namun pengeluaran pemerintah dan swasta ini tidak menyampingkan kepentingan publik seperti kesehatan, kesehatan dan pelayanan

sosial. Pada tingkat pembangunan ekonomi lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Guritno, 1993).

Di berbagai negara, alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan bahkan lebih besar untuk masyarakat miskin. Salah satunya Peru, sekitar satu per enam pengeluaran pemerintah di Peru digunakan untuk mensubsidi pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Haughton pada tahun 2005 ini mendapati bahwa pengeluaran pendidikan sangat progresif dan persentasenya lebih besar berpihak kepada rumah tangga miskin daripada rumah tangga kaya (Haughton dan Shahidur, 2012).

Prioritas pengeluaran pemerintah dalam rangka peningkatan masyarakat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Keberhasilan peningkatan pendidikan masyarakat tercermin pada meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan. Apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011). Tabel 1.3 menggambarkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah berdasarkan pulau menurut fungsi pendidikan.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Pendidikan (persen)

Pulau	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Sumatera	-0.0502	-0.2929	0.36143	-0.0522
Jawa & Bali	0.8995	0.20482	0.21296	0.23659
Kalimantan	0.03924	0.0305	-0.171	0.73547
Sulawesi	-0.0607	0.03409	0.23767	0.02684
Papua & lainnya	0.05446	0.00888	0.02434	-0.1247

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2013, diolah

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan pertumbuhan pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berdasarkan pulau yang ada di Indonesia. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa dan Bali selalu meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan yang selalu positif meskipun tren menunjukkan fluktuasi. Penurunan pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terjadi pada provinsi-provinsi yang berada pada pulau Sumatera pada tahun 2010 dan 2011, kemudian naik pada tahun 2012 dan kembali turun pada tahun 2013.

Serupa dengan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Peru, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan juga diprioritaskan untuk rumah tangga miskin. Penelitian yang dilakukan oleh Castro dkk tahun 2000 pada negara Ghana, menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan mengalami peningkatan. Pengeluaran atau subsidi kesehatan ini berupa penyediaan fasilitas kesehatan yang memungkinkan rumah tangga miskin menggunakan jasa kesehatan yang ada.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar dari pembangunan guna mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang produktif yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengantarkan mereka jauh dari jurang kemiskinan. Menurut Mankiw (2003) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah untuk fungsi kesehatan ditunjukkan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Kesehatan (persen)

Pulau	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Sumatera	0.14534	0.02061	0.16952	0.1023
Jawa & Bali	0.32396	0.26029	0.25457	0.28471
Kalimantan	0.10008	0.21608	0.16511	0.39088
Sulawesi	0.1519	0.53372	-0.0095	0.10651
Papua & lainnya	0.24232	0.12302	0.12018	0.16351

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2013, diolah

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah menurut fungsi kesehatan di Indonesia terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan yang selalu positif. Akan tetapi provinsi-provinsi yang berada pada pulau Sulawesi secara rata-rata mengalami penurunan pengeluaran pemerintah pada tahun 2012 sebesar 0.009 persen.

Menurut Supriyanto dkk (2014) perlindungan sosial juga sangat berdampak dalam pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Tabel 1.5 menggambarkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial.

Tabel 1.5
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Perlindungan Sosial (persen)

Pulau	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Sumatera	-0.0834	0.23629	0.26278	0.34964
Jawa & Bali	0.18896	0.24927	0.18588	0.12839
Kalimantan	0.11598	0.17871	0.19581	0.09365
Sulawesi	0.20503	0.29808	0.20456	0.00023
Papua & lainnya	-0.1547	-0.0093	0.24229	0.07509

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2013, diolah

Pada tabel 1.5 dapat dilihat provinsi-provinsi yang berada pada pulau Sumatera dan Papua rata-rata pada tahun 2010 mengalami penurunan pengeluaran pemerintah menurut fungsi perlindungan bahkan provinsi-provinsi yang berada pada pulau Papua dan lainnya kembali turun pada tahun 2011. Provinsi-provinsi dengan dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial paling tinggi adalah provinsi yang berada pada pulau Sulawesi dengan pertumbuhan sebesar 0,2 persen, akan tetapi pertumbuhan ini mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 0,00023 persen.

Pada banyak negara berkembang, investasi pada prasarana infrastruktur menjadi suatu pilihan yang disukai dan mempunyai porsi yang sangat besar dari total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam pengadaan prasarana infrastruktur. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan.

Menurut Rofiq (2012) pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan. Bagi para investor atau pelaku pasar termasuk para arsitek pembangunan, core value daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan, selanjutnya strategi investasi infrastruktur dapat memacu pertumbuhan sosial ekonomi dan

mengentaskan kemiskinan. Tabel 1.6 menggambarkan perkembangan pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut fungsi infrastruktur.

Tabel 1.6
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Fungsi Infrastruktur
(persen)

Pulau	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Sumatera	-0.0796	-0.0783	0.43878	0.46041
Jawa & Bali	0.07932	-0.1062	0.29749	0.16125
Kalimantan	0.15156	0.17557	0.6719	0.12917
Sulawesi	0.02289	0.04557	0.36393	0.43958
Papua & lainnya	-0.0991	0.06182	0.25251	0.11763

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2010-2013, diolah

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa hanya provinsi-provinsi yang berada pada pulau Kalimantan dan Sulawesi saja yang selalu mengalami peningkatan pengeluaran pemerintah fungsi Infrastruktur selama periode penelitian meskipun tren pertumbuhannya fluktuatif. Sedangkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah fungsi infrastruktur provinsi-provinsi di pulau Sumatera negatif pada tahun 2010 dan 2011. Pertumbuhan yang negatif tahun 2010 juga terjadi pada provinsi-provinsi di pulau Papua dan sekitarnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterahkan masyarakat dan menuju masyarakat yang bebas dari kemiskinan . Dari beberapa teori dan penelitian yang telah dilakukan yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini membahas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap kemiskinan. Penelitian ini diberi judul “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi*

pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia).”

1.2 Rumusan Masalah

Pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2013 memang terus menurun, namun pada kenyataannya penurunan jumlah penduduk secara nasional tidak diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia. Terdapat beberapa provinsi yang justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Menurut *World Bank* untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) yaitu : *pertama*, pengeluaran pemerintah membantu masyarakat miskin dari segi pendapatan melalui perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. *Kedua*, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

Terdapat beberapa pengeluaran pemerintah yang didedikasikan untuk masyarakat atau yang disebut *pro-poor social expenditure*. Pengeluaran ini adalah pengeluaran yang terkait kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta bantuan perlindungan sosial yang dapat membantu masyarakat miskin.

Berdasarkan permasalahan diatas muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan Infrastruktur secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia.

5. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian, pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab dengan tujuan untuk penjas dan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah kemiskinan di indonesia serta pengeluaran pemerintah untuk masyarakat miskin yaitu pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah penelitian. Bab ini juga

memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang diantaranya adalah teori kemiskinan teori belanja daerah, teori belanja *pro-poor*, klasifikasi pengeluaran pemerintah. Bab ini juga menjelaskan hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait serta didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Pada bagian akhir bab juga terdapat kerangka pemikiran dan lima hipotesis yang diajukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian yaitu kemiskinan sebagai variabel terkait dan pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur sebagai variabel bebas yang dijelaskan dengan definisi operasional variabel. Bab ini juga menjelaskan jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode analisis penelitian yang digunakan yaitu *Panel Least Square* (PLS) dengan metode *fixed effect*.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan deskripsi kemiskinan di Indonesia dan perkembangan pengeluaran pemerintah menurut fungsi

pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta infrastruktur. Pada bagian inti bab ini memaparkan hasil analisis data penelitian berupa pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik dan pengujian statistik berupa uji parameter individual (uji-t), uji simultan (uji-F) dan uji koefisien determinasi (R^2) serta interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.